

## KARAKTERISTIK DAN POTENSI KONFLIK DALAM AKTIVITAS PERIKANAN TANGKAP DI DAERAH ALIRAN SUNGAI MUSI, SUMATERA SELATAN

Andi Indra Jaya Asaad<sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> Peneliti pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum, Mariana-Palembang

### ABSTRAK

Daerah aliran Sungai Musi merupakan salah satu sungai besar dan mempunyai peranan penting dalam aspek ekologi dan ekonomi. Berbagai kepentingan dan peran dari beragam pengguna (*stakeholders*) dalam pemanfaatan daerah aliran Sungai Musi dapat menjadi potensi timbul konflik antar pengguna baik itu lintas sektor maupun dalam suatu sektor sendiri. Salah satu pengguna yang dominan adalah sektor perikanan khusus perikanan tangkap. Beragam alat tangkap dan pengoperasian terdapat hampir di seluruh badan air, khusus di daerah rawa banjir dapat menyebabkan konflik antar nelayan tangkap sendiri. Pengetahuan terhadap karakteristik dan potensi konflik merupakan hal penting dalam pengelolaan perikanan tangkap di perairan umum.

**KATA KUNCI:** potensi konflik, aktivitas perikanan tangkap, Sungai Musi, Sumatera Selatan

### PENDAHULUAN

Perairan umum di Sumatera Selatan mencakup sungai, anak sungai, rawa, dan danau seluas 2,5 juta ha dengan berbagai fungsi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar. Sungai Musi di Sumatera Selatan mempunyai beragam fungsi antara lain sarana transportasi, industri, pertanian, kehutanan, perikanan, dan bahkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor penting. Menurut data Statistik Indonesia tahun 2003, produksi perikanan perairan umum di Sumatera Selatan pada tahun 2001 mencapai 41.769 ton, dengan rumah tangga perikanan mencapai 31.751 buah. Selain itu, menurut Samuel *et al.* (2001); Utomo *et al.* (1993) terdapat lebih dari 120 spesies ikan di Sungai Musi.

Upaya penangkapan ikan di Sungai Musi diindikasikan telah menunjukkan lebih tangkap (*over fishing*), disertai dengan penggunaan beberapa alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti tugal yang menghambat daur hidup ikan atau udang (Utomo *et al.*, 1992). Keterbatasan sumber daya alam khusus perikanan dan tinggi upaya penangkapan dengan berbagai cara penangkapan menjadikan ada kecenderungan potensi konflik dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

### KONFLIK DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Pemanfaatan suatu sumber daya alam termasuk perikanan tidak lepas dari potensi konflik yang dapat terjadi. Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam

memiliki suatu kecenderungan yang lebih dinamis dan kompleks dibandingkan dengan konflik dalam kehidupan manusia sehari-hari (Walker & Daniels, 1997 *disusun oleh* Yasmi, 2002). Charles (1992) mengatakan bahwa pada sistem biososial ekonomi yang kompleks dan dinamis seperti sumber daya perikanan dengan berbagai interaksi ekosistem, manusia, dan kelembagaan, maka akan sering dijumpai ada potensi konflik. Hal ini, tidak terlepas dari kompleksitas sumber daya perikanan di mana terlibat di dalam beragam pengguna (*multiusers*), beragam nilai budaya dan norma, ketidakpastian informasi dan terbatas payung hukum, serta aturan yang mengikat dalam pemanfaatan.

Pada dasarnya suatu konflik dapat terjadi dalam suatu interaksi antara 2 atau lebih pengguna (*users*) dari sumber daya perikanan di mana dalam hubungan interaksi tersebut terjadi perbedaan pandangan, pemikiran, emosi, dan perbedaan kepentingan antara sesama pengguna. Perbedaan tersebut kemudian disikapi sebagai suatu ancaman atau hal yang mengganggu oleh pihak pengguna lain, maka suatu konflik dapat terjadi (Yasmi, 2002). FAO (2000) mengatakan bahwa konflik pengelolaan sumber daya alam muncul dikarenakan ketidakcocokan, perselisihan terhadap hak akses, kontrol, dan penggunaan suatu sumber daya.

Menurut Charles (1992), pada sektor perikanan, konflik dapat terjadi secara internal yaitu perebutan wilayah penangkapan ikan antara nelayan dikarenakan keterbatasan sumber daya perikanan, perselisihan antara pembagian keuntungan antara nelayan dengan juragan (pemilik modal), dan pada tingkat nelayan atau kelompok nelayan dengan

pemerintah setempat, di mana kebijakan pemerintah kadangkala tidak dapat diterima oleh nelayan. Konflik pada sektor perikanan dapat terjadi secara eksternal atau lintas sektoral, seperti antara sektor pariwisata, industri, pertanian, pertambangan, dan dengan sektor perikanan sehubungan multifungsi dari suatu sumber daya perairan.

Pemahaman dan kemampuan dalam mengenali potensi konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam khusus sumber daya perikanan merupakan hal penting dalam pengembangan program pengelolaan sumber daya perikanan.

### **KARAKTERISTIK DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI MUSI**

Pada dasarnya sungai merupakan sistem yang linier di mana air mengalir dari daratan menuju lautan (Welcomme, 1985). Menurut Samuel *et al.* (2001); Utomo *et al.* (1993), ekosistem daerah aliran sungai sangat kompleks dan secara umum terbagi dalam 3 tipe yaitu:

1. Tipe perairan berarus deras sampai dengan sedang. Tipe ini bukan merupakan daerah banjiran dan pada umumnya berbatu serta tidak ada rawa. Tipe ekosistem seperti ini merupakan tipe habitat bagian hulu sungai (*up stream*). Pada daerah aliran Sungai Musi daerah ini memanjang mulai dari Muara Kelingi sampai dengan ke arah hulu pada ketinggian 45 m di atas permukaan air laut.

Pada daerah ini aktivitas penangkapan tidak banyak dikarenakan penangkapan ikan bukan merupakan mata pencaharian utama. Pada umumnya alat yang dipergunakan merupakan peralatan penangkapan yang sederhana seperti tangkul (*life net*), jala (*cash net*), dan pancing (*hook and line*).

2. Tipe perairan berarus sedang sampai dengan lambat. Tipe ini terdapat banyak anak sungai dan di sekeliling sungai banyak terdapat rawa banjiran (*flood plain*). Tipe ekosistem seperti ini merupakan tipe bagian tengah sungai (*middle stream*). Pada daerah aliran Sungai Musi tipe ini terletak pada daerah Muara Kelingi ke arah hilir sampai dengan Tebing Abang.

Tipe sungai rawa banjiran merupakan ekosistem yang kompleks dan merupakan habitat yang memiliki keragaman spesies ikan yang tinggi. Sungai rawa banjiran mempunyai

karakteristik perubahan secara tahunan, di mana biomassa dan produksi makanan alami ikan meningkat secara signifikan selama masa air tinggi. Berbagai jenis ikan pada wilayah rawa banjiran ini telah beradaptasi dengan siklus hidup memijah pada permulaan air tinggi (banjir), sehingga pada masa ini terdapat sangat banyak anak ikan (Hoggarth *et al.*, 1999).

Tipe rawa banjiran yang terdapat banyak vegetasi kumpe (Graminae) banyak terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan rawa banjiran tipe hutan rawa banyak terdapat di Kabupaten Banyuasin dan Musi Rawas (Utomo *et al.*, 1993).

Tinggi keragaman jenis ikan pada tipe sungai ini menyebabkan aktivitas penangkapan juga tinggi, di mana aktivitas penangkapan merupakan mata pencaharian utama. Berbagai jenis alat tangkap pada umumnya terdapat pada daerah ini, seperti kilung (*fyke nets*), tuguk (*filtering device*), empang (*barrier traps*), corong (*filtering device*), dan berbagai jenis alat tangkap portable (Hoggarth *et al.*, 1999; Utomo *et al.*, 1993).

Pemanfaatan sumber daya perikanan pada wilayah ini juga beraneka ragam. Pada umumnya daerah rawa banjiran merupakan daerah penangkapan umum (*open access*) dan beberapa wilayah perairan secara khusus dijadikan daerah penangkapan dengan sistem pembagian kewenangan melalui sistem lelang. Sistem lelang ini merupakan ciri khas pengelolaan perikanan tangkap di Sumatera Selatan. Pada perairan Sungai Lempuing, yang merupakan anak Sungai Musi, sistem ini telah ada sejak tahun 1822 yang dikembangkan oleh pemimpin kerajaan Palembang untuk mencegah berkembangnya konflik antar nelayan (Depati H. Muh Rawas *dikutip oleh* Hoggarth *et al.*, 1999).

3. Tipe perairan yang dipengaruhi pasang surut air laut. Tipe ini terdapat pada bagian hilir sungai. Tipe ekosistem seperti ini terdapat di Sungai Musi memanjang dari Tebing Abang ke arah hilir sampai dengan di daerah muara sungai. Pada umumnya pada wilayah ini terdapat berbagai aktivitas industri (pertamina, pusri, kayu, dan minyak kelapa sawit) dan pertanian pasang surut di sekitar muara sungai (Utomo *et al.*, 1993).

## POTENSI KONFLIK PERIKANAN TANGKAP DI DAERAH ALIRAN SUNGAI MUSI

Beragamnya kegiatan di sepanjang daerah aliran Sungai Musi dengan berbagai karakteristik perairan dan besar jumlah rumah tangga perikanan dengan berbagai jenis alat tangkap dan sistem pembagian kewenangan, dapat berpotensi besar menimbulkan pergesekan kepentingan dan persepsi internal pengguna (masyarakat nelayan) maupun secara eksternal (dengan berbagai sektor lain).

Sifat perairan Sungai Musi yang merupakan *open access* menyebabkan dapat terjadi suatu eksploitasi sumber daya perikanan yang berlebih dikarenakan ada kemungkinan setiap individu atau kelompok pengguna berusaha sedapat mungkin untuk mengeksploitasi sebanyak-banyaknya sumber daya perikanan yang ada. Hal ini, terlihat dari tumbuh berbagai kegiatan perikanan tangkap dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti kilung dan tuguk yang dapat memutus siklus hidup ikan dan udang. Dampak negatif yang lebih lanjut dapat terjadi bagi kegiatan perikanan tangkap dan kelestarian sumber daya hayati dan lingkungan di Sungai Musi itu sendiri. Karakteristik *open access* suatu sumber daya dapat menyebabkan terjadi *tragedy of common* yang pada akhir menyebabkan hilang berbagai fungsi sumber daya itu sendiri (Feeny *et al.*, 1990).

Potensi konflik yang dapat terjadi karena karakteristik *open access* adalah konflik pemanfaatan suatu wilayah penangkapan ikan, di mana nelayan dengan peralatan yang kompleks dan tidak ramah lingkungan dapat mengganggu nelayan dengan peralatan yang sederhana. Tanpa suatu aturan yang mengikat dan ditaati bersama, maka berpotensi menimbulkan perebutan wilayah penangkapan antar nelayan.

Karakteristik perairan *open access* juga dapat menimbulkan konflik eksternal. Kegiatan industri dan pertanian yang pada umumnya menghasilkan limbah dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan kegiatan perikanan tangkap.

Selain itu, pola pembagian kewenangan suatu wilayah perairan di Sungai Musi melalui sistem lelang juga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan pemanfaatan sumber daya perairan yang dilelang. Hal ini, dapat terjadi karena pada umumnya lama waktu kewenangan sistem lelang terhadap suatu wilayah perairan hanya 1 tahun dan pemenang lelang pada umumnya dari kalangan pedagang yang mempunyai modal kuat dan kemudian dijual atau diserahkan kepada para nelayan dengan berbagai

syarat-syarat yang sangat mengikat (Nasution *et al.*, 1992).

Potensi konflik yang dapat ditimbulkan yaitu konflik pemanfaatan antara nelayan atau pemegang hak lelang dengan nelayan peserta lelang tahun berikut, di mana waktu kewenangan yang hanya 1 tahun menyebabkan nelayan atau pemegang hak lelang berusaha menguras sumber daya yang ada. Eksploitasi tanpa batas secara signifikan dapat merusak habitat dan keseimbangan hidup ikan, sehingga pengguna atau nelayan lain yang akan menggunakan wilayah perairan tahun berikut (melalui sistem lelang) kemungkinan tidak dapat mencapai hasil yang optimal.

Nasution *et al.* (1992) mengatakan bahwa terbatas waktu kewenangan yang hanya 1 tahun menimbulkan persepsi nelayan bahwa mereka berusaha menangkap ikan sebanyak-banyaknya, sekalipun dalam wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah *reservat*, karena belum tentu tahun depan mereka memenangkan lelang kembali.

Selain konflik pemanfaatan, potensi konflik kepentingan antara pemegang hak lelang dengan nelayan pekerja juga dapat terjadi di mana sistem penjualan kepada nelayan pekerja dan persyaratan yang diajukan pemegang hak lelang pada umumnya dilakukan secara sepihak. Sebagaimana dikatakan Smith (1987) *dikutip oleh* Nasution *et al.* (1992) bahwa surat lelang yang dijual oleh pemegang hak lelang (pedagang dengan modal kuat) kepada nelayan pekerja dengan harga yang lebih tinggi, kadang-kadang mencapai 50 sampai dengan 100% dari harga yang tercantum dalam surat lelang tersebut.

Pada contoh kasus sistem lelang di perairan Sungai Lempuing, orientasi pemanfaatan lebih ke arah komersial baik dari pandangan pemegang hak lelang atau nelayan maupun dari pemerintah setempat dan tidak mempunyai sasaran konservasi (Hoggarth *et al.*, 199).

## KESIMPULAN

1. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beragam fungsi dari daerah aliran Sungai Musi khusus dari aktivitas perikanan tangkap tidak terlepas dari potensi konflik, baik secara internal pengguna atau nelayan maupun secara eksternal (antara pengguna atau nelayan dengan kegiatan pemanfaatan daerah aliran Sungai Musi lainnya).

2. Mengenali potensi konflik yang dapat terjadi di daerah aliran Sungai Musi dalam kegiatan perikanan tangkap dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam program pengelolaan sumber daya perikanan dan keberlanjutan perikanan tangkap di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2003. Statistik Indonesia 2003. Jakarta. Indonesia.
- Charles, A. 1992. Fishery conflict: A unified framework. *Journal of Marine Policy*. September edition. p. 379–393.
- FAO. 2000. Conflict and natural resource management. Rome. Italy.
- Feeny, D., F. Berkes, B. J. MacCay, & J. Acheson. 1990. The tragedy of the commons: Twenty-two years later. *Human Ecology*. 18:1. p.1-19.
- Hoggarth, D. D., V. J. Cowan, A. S. Halls, M. A. Thomas, J. A. McGregor, C. A. Garaway, A. I. Payne, & R. L. Welcomme. 1999. Management guidelines for Asian floodplain river fisheries part 2. Summary of DFID research. FAO Fisheries Technical Paper. No.384/2. Rome. FAO. 1999. 117 p.
- Nasution, Z., A. D. Utomo, D. Sadili, M. F. Sukadi, & A. K. Gaffar. 1992. Sosial ekonomi sumber daya perikanan di beberapa daerah aliran Sungai Musi dan Kapuas. *Prosiding Temu Karya Ilmiah Pengkajian Kebijakan Pengelolaan Sungai dan Perairan Umum Bagi Perikanan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan bekerja sama dengan USAID/FRDP. Hal: 81–92.
- Samuel, S. Adjie, & Subagja. 2001. Inventarisasi dan distribusi biota serta karakteristik habitat Sungai Musi. Laporan Teknis. Balai Riset Perikanan Perairan Umum. Palembang.
- Utomo, A. D., M. F. Sukadi, Z. Nasution, & D. Sadili. 1992. Potensi sumber daya perikanan daerah aliran Sungai Musi dan Kapuas. *Prosiding Temu Karya Ilmiah Pengkajian Kebijakan Pengelolaan Sungai dan Perairan Umum Bagi Perikanan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan bekerja sama dengan USAID/FRDP. Hal: 29–49.
- Utomo, A. D., Z. Nasution, & S. Adjie. 1993. Kondisi ekologi dan potensi sumber daya perikanan sungai dan rawa di Sumatera Selatan. *Prosiding TKI Perikanan Perairan Umum*. Pengkajian potensi dan prospek pengembangan perairan umum Sumatera Selatan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan. Jakarta. p: 46–61.
- Yasmi, Y. 2002. *Conflict in forest management*. MSc thesis Tropical Forestry. Wageningen University.
- Welcomme, R. L. 1985. River Fisheries. FAO Fish 1985. Tech Pap. (262): 330 p.